



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 490 /KPTS/MU/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
DAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PADA PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penilaian penyelenggaraan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Assessor dan Tim Penjaminan Kualitas pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 nomor 1032);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
11. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
12. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Assesor Dan Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pada Tingkat Pemerintah Daerah Dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Assesor dan Tim Penjaminan Kualitas pada Tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Tim Assesor Tingkat Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian atas komponen penetapan tujuan bagian sasaran strategis pemerinah daerah dan komponen pencapaian tujuan;
- b. Tim Assesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan penilaian atas sebagian komponen penetapan bagian strategis pencapaian sasaran strategis tingkat Organisasi Perangkat Daerah dan komponen struktur dan proses;
- c. Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah melaksanakan penjaminan kualitas atas komponen penetapan tujuan bagian sasaran strategis pemerintah daerah dan komponen pencapaian tujuan;
- d. Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan penjaminan kualitas atas sebagian komponen penetapan bagian strategis pencapaian sasaran strategis tingkat Organisasi Perangkat Daerah dan komponen struktur dan proses.

- Ketiga : Tim Assesor tingkat pemerintah daerah dan Tim Assessor tingkat OPD bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada koordinator pelaksanaan penilaian mandiri yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Keempat : Tim Penjaminan Kualitas tingkat pemerintah daerah dan Tim Penjaminan Kualitas tingkat OPD bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator penjaminan kualitas yaitu Inspektur Provinsi Maluku Utara;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi,
pada tanggal 27 Juni 2024
Pj.GUBERNUR MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Jakarta;
3. Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 490 /KPTS/MU/2024
TANGGAL : 27 Juni 2024
DAFTAR : TIM ASSESOR DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
DAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

1. DAFTAR SUSUNAN TIM ASSESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

No	Tim Asesor	OPD Penanggung jawab
1.	Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Sekretariat Daerah
2.	Sekretaris	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program	
5.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	
6.	Sekretaris	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
8.	Kasubag Pengelola Aset	
9.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	
10.	Sekretaris	Inspektorat
11.	JF Perencanaan Ahli Muda	
12.	JF Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah II	
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

2. DAFTAR SUSUNAN TIM ASSESOR TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

No	OPD	Jabatan
1.	Sekretariat Daerah	Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi
		Kabag Tata Laksana Biro Organisasi
		Perencana Ahli Muda Biro Organisasi
		Analisis Organisasi Biro Organisasi
		Kabag Kerja Sama dan Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Analisis Perencanaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Analisis Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Kabag Penganggaran dan Pengawasan
		Kasubbag Tata Usaha dan Perlengkapan
		Analisis Keuangan
		Penyusun Rencana Keuangan
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
		Analisis Perencanaan
		Analisis Laporan Keuangan
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kabid Akuntansi dan Aset
		Kabid Anggaran
		JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
		JF Perencana Ahli Muda
5.	Inspektorat	Inspektur Pembantu Wilayah II
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		JF Perencanaan Ahli Muda
		JF Auditor Ahli Muda pada Irban Wilayah II
		JF Auditor Ahli Pertama pada Irban Wilayah II
6.	Badan Pendapatan Daerah	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
		Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
		Kabid Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
		Kasubbid Pengendalian Pendapatan

7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah
		Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Analisis Keuangan
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Analisis Keuangan
		JF Perencana Ahli Muda
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan
10.	Badan Kepagawaian Daerah	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
		Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
		Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
		Analisis Perencanaan Anggaran
11.	Badan Penghubung	Kasubbag Tata Usaha
		Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Pemerintah
		Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
12.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
		Kabid Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama
		Kasubbid Koordinasi Perencanaan Penataan Batas Negara
		JF Perencana Ahli Muda
13.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kabid Inovasi dan Teknologi
		JF Perencana Ahli Muda
		Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabid Pembinaan dan Ketenagaan
		Analisis Perencanaan
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		Analisis Laporan Keuangan
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Kabid Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan E-Government
		Kasi Pengelolaan Statistik Sektor
		Analisis Keuangan
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kebid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
		Kasi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja
		Analisis Perencanaan Program
		Analisis Laporan Keuangan
17.	Dinas Pertanian	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura
		JF Perencana Ahli Muda
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Analisis Keuangan
18.	Dinas Kesehatan	Kabid Kesehatan Masyarakat
		Analisis Perencanaan Anggaran
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan
		Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan
		Pengelola Keuangan
		JF Perencana Ahli Muda
20.	Dinas Lingkungan Hidup	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		JF Perencana Ahli Muda
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kasubbag Perencanaan dan Program
		Kabid Perikanan Tangkap
		Analisis Perencanaan
		JF Analisis Keuangan Pusan dan Daerah Ahli Muda
22.	Dinas Perhubungan	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
		Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan
		Kasi Lalu Lintas Jalan
		JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
23.	Dinas Pangan	Analisis Perencanaan Anggaran
		Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan

		Analisis Data dan Informasi
		JF Perencana Ahli Muda
24.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kasubbag Perencanaan dan Program
		Kabid Kelembagaan dan Perizinan
		Analisis Perencanaan Anggaran
		JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
25.	Dinas Pariwisata	Kabid Destinasi Pariwisata Daerah
		Analisis Perencanaan
		Pengelola Keuangan
		JF Perencana Ahli Muda
26.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabid Perumahan
		Kasi Pertanahan dan Kawasan Permukiman
		Analisis Perencanaan dan Kerja Sama
		Analisis Keuangan
27.	Dinas Sosial	Kasubbag Perencanaan dan Program
		Kabid Rehabilitasi Sosial
		Analisis Perencanaan Anggaran
		Analisis Laporan Keuangan
28.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Analisis Perencanaan Anggaran
		Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Analisis Peraturan Investasi
		JF Perencana Ahli Muda
29.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga
		Analisis Perencanaan Anggaran
		Analisis Pengembangan SDM Aparatur
		JF Perencana Ahli Muda
30.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kasubbag Perencanaan dan Program
		Kabid Mineral dan Batubara

		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		Analis Keuangan
31.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabid Bina Marga
		Kasi Pembangunan
		Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		JF Perencana Ahli Muda
32.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Analis Perencanaan
		Kabid Pemenuhan Hak Anak
		Kasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Analis Keuangan
33.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kasubbag Perencanaan dan Program
		Kabid Pengembangan Industri
		Kasi Jaminan Mutu
		Analis Data dan Informasi
34.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kasubbag Perencanaan dan Program
		Kabid Pemerintahan Desa
		Kabid Sosial dan Kerja Sama Desa
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
35.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabid Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
		Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
		Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Analis Laporan Realisasi Anggaran
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
		Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
		Kasi Kerja Sama
		Analis Perencanaan

3. DAFTAR SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

No	Jabatan	Keterangan
1.	Inspektur Provinsi Maluku Utara	Koordinator Penjaminan Kualitas
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Penjamin Kualitas Tingkat Pemda
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Penjamin Kualitas Tingkat Pemda
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Penjamin Kualitas Tingkat Pemda
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Penjamin Kualitas Tingkat OPD
6.	Auditor Ahli Madya Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Penjamin Kualitas Tingkat OPD
7.	Auditor Ahli Muda Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Penjamin Kualitas Tingkat OPD
8.	Auditor Ahli Muda Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Penjamin Kualitas Tingkat OPD

Pj.GUBERNUR MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR